



Buletin Parlementaria

DPR Dorong Pusat Data Nasional Terapkan Standar Keamanan Siber



3 DPR Soroti
Banyak Daerah
Krisis Air Bersih



4 Gus Imin
Apresiasi
Komitmen TNI
Jaga Netralitas
Pemilu 2024

Nomor 1264/III/IX/2023 September 2023



9 772614 339005



DPR Dorong Pusat Data Nasional Terapkan Standar Keamanan Siber

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Kemenkominfo RI, harus menerapkan standar keamanan yang ketat bagi ekosistem siber di Indonesia. Menurutnya, kebocoran data lewat siber sering terjadi di Tanah Air. Untuk itu, PDN diserukan mampu mengidentifikasi kebocoran secara preventif.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi I DPR RI dengan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Kemkominfo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya yang memimpin delegasi Komisi I ini, mengatakan, pembangunan PDN yang efektif, akan mampu mengidentifikasi kebocoran data, bahkan dapat melakukan pencegahan kebocoran tersebut secara preventif.

Disampaikan Riefky, pembangunan PDN, merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah, khususnya Pasal 27 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pembangunan PDN ini, lanjutnya, akan menjadi ekosistem untuk menampung data yang begitu masif di lingkungan pemerintahan.

"Maka dari itu, kunjungan kerja Komisi I DPR RI ini, ingin mengetahui



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya foto bersama usai pertemuan Komisi I DPR RI dengan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Kemkominfo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023).

secara komprehensif soal perkembangan pembangunan PDN sekaligus melihat bagaimana upaya PDN dalam menaruh standar keamanan, sehingga dapat meminimalisir kebocoran data di lingkup pemerintahan," ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan, saat ini PDN sedang dibangun di Cikarang dengan menempati areal lahan 5 hektar. PDN ini, melengkapi pembangunan PDN yang sudah ada di Batam dan Labuabajo. Di IKN, PDN dengan kapasitas yang lebih besar juga sedang dibangun. PDN berperan

mencegah kebocoran data siber di Indonesia. Terakhir, ada 107 kasus kebocoran data, termasuk kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dalam kesimpulan pertemuannya, Riefky menyampaikan, Kemkominfo RI agar memastikan pemenuhan prosedur administratif yang berlaku dengan mengedepankan prinsip *good governance* dan memperhatikan prinsip keamanan yang mengacu pada praktik *cyber security* yang andal untuk mendorong koordinasi yang aman terkait bagipakai data.

mh/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



DPR Soroti Banyak Daerah Krisis Air Bersih



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. FOTO: ENO/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk bertindak cepat dan efisien dalam mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah buntut kemarau panjang. Ia menekankan, ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat.

"Saya mendesak Pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu *droping* air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain," kata Puan, Rabu (13/9).

Seperti diketahui, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat wilayahnya kekeringan karena kemarau panjang. Penyebab

kekeringan disinyalir karena musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sumur-sumur cadangan air bersih warga mengalami krisis debit air.

"Kekeringan adalah bencana. Dengan sinergi yang baik dari semua elemen bangsa, diharapkan kesulitan warga bisa segera teratasi," tegas Puan. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah dapat merespons cepat keluhan warga, terutama dalam pemenuhan air bersih.

"Bencana ini merupakan peringatan yang harus ditangani dengan serius. Kita harus bekerja keras bersama-sama untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks," tutur Puan. **rnm/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimban, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Bagegys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Gus Imin Apresiasi Komitmen TNI Jaga Netralitas Pemilu 2024

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi

komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2024, sebagaimana disampaikan Kababinkum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro. Menurut politisi yang akrab disapa Gus Imin itu, komitmen netralitas TNI ini dapat memberi dampak baik terhadap pelaksanaan Pemilu, terutama terkait dengan pengamanan, sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi.

"Ya tentu saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Saya rasa ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita, dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu," kata Gus Imin di Jakarta, Rabu (20/9).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendorong TNI untuk lebih mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait netralitasnya dalam Pemilu. Ia pun berharap agar komitmen netralitas tersebut dapat diterapkan di setiap jenjang jabatan pada setiap mata.

"Saya harap bukan cuma di jajaran petinggi TNI saja yang netral, tapi juga seluruh prajurit di semua mata. Nah, di sini penting melakukan edukasi berkelanjutan yang fokus pada pemahaman dan komitmen terhadap netralitas TNI," urainya dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI ini juga mendorong TNI menjalankan pengawasan internal yang ketat melalui mekanisme seperti inspeksi rutin, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan



FOTO: DOK/PDT

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar.

oleh atasan langsung. Menurutnya, hal tersebut dapat membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas politik yang melanggar aturan, termasuk kewajiban pemberian sanksi tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Berikut 11 poin larangan sekaligus komitmen netralitas prajurit TNI yang harus dipedomani jelang Pemilu 2024. Beberapa diantaranya larangan memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahannya apa pun berkaitan dengan kontestan pemilu dan pilkada kepada keluarga atau masyarakat; Lalu, secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan pemilu dan pilkada; Serta, menyimpan dan

menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta pemilu atau pilkada di instansi dan peralatan milik TNI.

Para prajurit itu pun dilarang, secara perorangan/satuan/fasilitas menyambut dan mengantar peserta kontestan; diikuti, menjadi anggota KPU, Panwaslu, panitia pemilih, panitia pendaftaran pemilih, peserta dan/atau juru kampanye; juga, terlibat dan ikut campur dalam menentukan penetapan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai; larangan lainnya, memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu.

uc/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Puan Harap APBN Akhir Periode Jokowi Berkeadilan untuk Rakyat

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memimpin pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. Puan pun berharap APBN tahun kepemimpinan terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dirinya pun berharap APBN 2024 dapat menjaga kemampuan fiskal dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional. Hal tersebut disampaikan saat sesi konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Penggunaan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (*well-being budget*) pada APBN Tahun Anggaran 2024 harus dapat menjadi acuan bagi setiap Kementerian dan Lembaga dalam mengusulkan anggarannya pada tahun anggaran yang akan datang," terang Puan melalui rilis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (21/9).

Ia pun mengingatkan agar seluruh program di kementerian atau lembaga diarahkan pada program-program yang berkualitas. Dengan begitu, terangnya, alokasi anggarannya dapat dirasakan oleh kelompok penerima manfaat. "Anggaran Berbasis Kesejahteraan tersebut juga harus dapat mencerminkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat yang secara langsung dirasakan manfaatnya," ungkap Puan.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya penguatan sinergi



FOTO: ENO/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

antara DPR dan Pemerintah terhadap realisasi arah kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi yang dilakukan secara efektif. Ditambahkannya, APBN 2024 diharapkan dapat diprioritaskan untuk program-program prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini mengingat, sebut Puan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 2 (dua) periode masa jabatannya.

"Kami berharap dan mendorong bahwa setelah APBN ini diketok untuk

tahun 2024 memang pelaksanaannya adalah APBN yang berkeadilan untuk rakyat, memprioritaskan program-program prioritas dari Pemerintahan Pak Jokowi sampai nanti masa berakhir bulan Oktober 2024," jelasnya

"Sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sampai hari ini masih belum selesai sesuai dengan target. Targetnya karena kami berharap APBN ini memang APBN untuk rakyat dan setelah 2 periode nanti ujungnya APBN terakhir ini akan berguna untuk rakyat," pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

ts/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



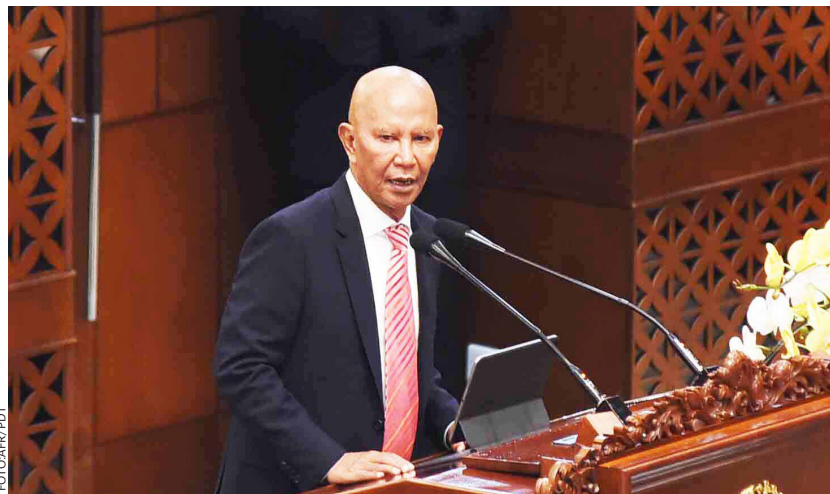
APBN 2024 Beri Ruang Bagi Penanganan Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyelesaian masalah kemiskinan ekstrim di Indonesia. Termaktub dalam RUU APBN 2024 bahwa tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi 0-1 persen.

"Badan Anggaran DPR RI mendukung target besar Pemerintah untuk mencapai target tingkat kemiskinan turun ke level 6,5-7,5 persen, dan mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem turun ke level 0-1 persen, yang tidak dicantumkan dalam RAPBN 2024," ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, pemerintah tidak dengan gamblang menentukan target tingkat kemiskinan ekstrim pada postur RAPBN yang diajukan. Namun, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6 persen – 7 persen pada 2024.

Pada pidato Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan tingkat I/ Pembahasan RUU APBN 2024, Said menuturkan



Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

bahwa memerangi kemiskinan dan pengangguran merupakan mandat konstitusi. Oleh sebab itu, agenda berkelanjutan menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial menjadi tugas yang akan terus didedikasikan sepanjang hayat.

"Keinginan kuat Pemerintah meninggalkan *legacy* penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan patut kita dukung," lanjut Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Lebih lanjut, Said menuturkan APBN 2024 akan menjadi modal penting bagi Pemerintah melunasi janji kepada rakyat, sebelum demisioner pada Oktober 2024. Target Pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem di level 0-1 persen, menurunkan prevalensi stunting ke level 14 persen,

menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen dan inflasi berada di level rendah patut didukung.

Adapun tingkat kemiskinan ekstrem pada September 2023 telah berada pada kisaran 1,74 persen. Sedangkan prevalensi stunting pada akhir tahun 2022 di angka 21,6 persen dan ditargetkan turun menjadi 17 persen pada 2023.

"Rasanya dengan *best effort*, Pemerintah bisa merealisasikan janji diatas. Karena itu, tiada hal yang pantas kita berikan kecuali sepenuhnya mendukung pihak yang hendak melunasi janji. Namun sebagai teman sejati, wajiblah nasihat-nasihat baik harus tetap kita sampaikan, meskipun terkadang hal itu terasa pahit. Tapi yakinlah, hal itu diniatkan baik kepada Pemerintah," kata Said. [uc/rdn](https://www.ri.go.id)



Darizal Harap RUU Kelautan memuat Aturan *Coast Guard* dan Diakui di Internasional

Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir berharap Rancangan Undang-Undang Kelautan Indonesia dapat memuat aturan terkait *Coast Guard* dan diakui di tingkat internasional. Terlebih, ia menilai laut ini merupakan daerah lalu lintas juga yang menghubungkan beberapa negara, baik dalam hubungan dagang maupun dalam hubungan yang lain.

"Apa landasan hukumnya (wilayah laut) dan yang kedua apakah selama ini ada hak-hak internasional, baik di wilayah ZEE kita maupun di wilayah teritorial yang kadang-kadang mungkin kita kurang tahu ya apa yang menjadi hak internasional," ucap Darizal Basir pada Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa pakar seperti CEO IOJI (*Indonesia Ocean Justice Initiative*), *Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy* dan Pemerhati Kemaritiman, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

Sebelumnya, ia mempertanyakan kelanjutan dari beberapa masalah kelautan yang dialami Indonesia. Salah satunya yakni *Illegal Fishing* yang sebelumnya bersengketa dengan Vietnam. "Nah pertanyaannya apakah ada penurunan angka *illegal fishing* secara signifikan setelah kita lakukan batas ZEE kita dengan Vietnam. Sebaliknya apakah ada peningkatan hasil produksi tangkap nelayan kita di wilayah yang selama ini telah menjadi sengketa?" ungkapnya.

Ia menilai penyebab sengketa *illegal fishing* yang terjadi dengan Vietnam diakibatkan dari belum adanya kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam. Kemudian pada tahun 2022 lalu Indonesia akhirnya menyepakati isu batas ZEE dengan Vietnam.

Tak hanya *Illegal Fishing*, dirinya juga menyoroti terkait permasalahan kelautan Indonesia lainnya. Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Barat I ini menyebut kedaulatan negara kerap kali dilanggar oleh negara lain. Maka dari itu dirinya mempertanyakan sejauh mana prinsip orang kelautan diakui

oleh hukum internasional dengan negara lain. Apalagi, dengan adanya sengketa dengan China dan pembangunan Pangkalan Militer di wilayah Indonesia.

"Ada satu prinsip yang kita dengar tadi. (Bahwa) laut itu tidak ada pemilikinya. Jadi bagi mereka pemilik laut adalah pemilik kapal. Ini prinsip orang lautnya. Nah sejauh mana prinsip ini diakui oleh hukum internasional dengan negara lain?" tanya Legislator Fraksi partai Demokrat ini. — laz,hal/rdn



FOTO: RSB/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir pada Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa pakar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/23).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Riyanta Soroti Isu Pelayanan Publik dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta menilai upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut ia sampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan publik ke Kabupaten Bogor.

"Ada beberapa hal yang sudah cukup baik, tetapi juga ada hal-hal yang perlu ditingkatkan kinerja pelayanan publik sesuai yang diinginkan undang-undang," ujar Riyanta kepada **Parlementaria** di Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9).

Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi perhatian pihaknya terkait Pelayanan Publik Kabupaten Bogor diantaranya kurangnya kedisiplinan pegawai pemerintahan.

"Berkaitan dengan keluhan beberapa warga masyarakat yang sampai kepada kami, bahwa di beberapa pemerintahan desa maupun kelurahan itu pejabatnya masih ada yang datang tidak sesuai jam kerja, ada yang jam 10 baru masuk ada yang jam 11 baru masuk, sehingga pelayanan masyarakat jadi terhambat," ungkapnya.

Selain itu, pelayanan bidang pertanahan juga menjadi sorotan

legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III tersebut. Ia menuturkan bahwa jumlah personel Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Bogor tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan sesuai jumlah masyarakat di Kabupaten Bogor.

"Tadi disampaikan oleh perwakilan BPN kabupaten bogor ternyata BPN bogor masuk kriteria grade a yang mestinya jumlah karyawannya harusnya 150 tapi disitu hanya ada 70 sedangkan jumlah masyarakat yang harus dilayani sebanyak 5 juta jiwa lebih," tambahnya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Bogor hingga akhir 2022 yaitu 5,4 juta jiwa. Menurutnya dengan tidak berimbangnya jumlah anggota BPN Kabupaten Bogor dengan jumlah masyarakat, hal tersebut akhirnya berimbas terhadap pelayanan publik bidang pertanahan yang tidak maksimal di wilayah tersebut.

Untuk itu, Riyanta mengatakan pihaknya berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat mempertimbangkan adanya penambahan personel pada BPN Kabupaten Bogor.

"Praktis pelayanan tidak bisa maksimal. Untuk itu saya berharap kepada menteri bpn atr untuk bisa menambah personil ke bpn kabupaten bogor agar pelayanan masyarakat bisa seperti yang diharapkan" pungkasnya. **rr/rdn**

FOTO: RR/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan publik di Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/10/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Revisi UU IKN Utamakan Jaga Kawasan dan Lingkungan Ibu Kota Negara

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan dengan disetujuinya Revisi UU IKN ke Paripurna, DPR dapat memberikan dukungan penuh agar pembangunan ibu kota negara bisa dipercepat dan semua pihak juga bisa turut terlibat. Meski demikian, Doli mengatakan dalam revisi ini pihaknya tetap mengutamakan prinsip-prinsip untuk menjaga kawasan di sekitar IKN.

"Supaya kawasan IKN ini juga punya kebermanfaatan buat masyarakat di sekitar, apalagi masalah soal Pertanahan itu harus *clear* betul, jadi ada beberapa catatan-catatan atau penambahan ayat-ayat yang walaupun diberi kemudahan

”

SUPAYA KAWASAN IKN INI JUGA PUNYA KEBERMANFAATAN BUAT MASYARAKAT DI SEKITAR, APALAGI MASALAH SOAL PERTANAHAN ITU HARUS *CLEAR* BETUL. JADI ADA BEBERAPA CATATAN-CATATAN ATAU PENAMBAHAN AYAT-AYAT YANG WALAUPUN DIBERI KEMUDAHAN KEPADA OTORITA IKN.

kepada Otorita IKN ini tetapi juga kita harus menjaga bahwa jangan sampai tanah dan lingkungan hidup disana tidak terjaga dengan baik," kata Doli saat ditemui **Parlementaria** usai memimpin rapat kerja Komisi II di Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

Disampaikan Doli, pihaknya selama satu bulan terakhir telah berusaha menyelesaikan revisi UU IKN tersebut, hingga akhirnya menghasilkan 16 pasal perubahan. "Kita laksanakan selama mulai dari tanggal 21 Agustus, jadi persis kira-kira 30 hari lah kita selesaikan undang-undang ini, dan itu kerja kita agak maraton, diskusi-diskusinya itu juga sangat produktif. Di luar rapat-rapat kerja, rapat-rapat resmi, kita juga bertemu dengan pemerintah terus kemudian dengan pakar-pakar dan seterusnya, tadi malam juga kita (rapat) *full* dari sehabian penuh," sambung Doli.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Golkar ini menjelaskan dari

16 pasal perubahan dari 44 pasal dalam undang-undang yang lama terdapat beberapa isu perubahan, "Diantaranya; soal kewenangan khusus, Pertanahan, soal pengelolaan keuangan, soal tata ruang, soal mitra kerja IKN di DPR, soal pengadaan perumahan, dan soal jaminan keberlanjutan," pungkas Doli. ➡ **we/aha**



FOTO: AFR/PDI

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat kerja Komisi II di Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Siti Nurizka Apresiasi Bareskrim Ungkap Gembong Narkoba Besar

Anggota Komisi III DPR RI Siti Nurizka Puteri Jaya memberikan apresiasi kepada kinerja Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap salah satu gembong besar narkoba Fredy Pratama. Seperti diketahui, jejak Fredy pratama berhasil terungkap setelah adanya barang bukti berupa 10,2 ton sabu dan 116 ribu butir ekstasi. Rizka menyatakan hal tersebut merupakan hasil dari kerja nyata, kerja keras dan kerja tanggap dari Bareskrim Polri serta jajaran terkait.

"Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap penangkapan Sindikat Narkoba Terbesar di Indonesia dengan barang Bukti sebesar 10,2 ton sabu & 116 ribu butir ekstasi. Penangkapan ini merupakan hasil dari Kerja Nyata, Kerja Tepat & Kerja Tanggap dari Rekan-Rekan Bareskrim Polri beserta seluruh jajaran," kata Rizka kepada **Parlementaria**, Rabu (13/9).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan hal tersebut tidak lepas dari kerja sama Polri bersama rekan-rekan dari polisi internasional Malaysia, Polisi Internasional Thailand dan juga US-DEA (Badan Narkotika Amerika Serikat). Rizka menyebut hal itu merupakan hasil kerja keras dari pimpinan Bareskrim yang dikomandoi Komjen Wahyu Widada.

"Saya juga ingin mengapresiasi terhadap Kinerja hasil operasi bersama Polri dengan rekan-rekan Internasional dari Royal Malaysia Police, Royal Thai Police, hingga US-DEA. Ini merupakan Bukti nyata & buah hasil dari

Kepemimpinan Kabareskrim Bapak Komjen Wahyu Widada beserta rekan-rekan seluruh jajaran Bareskrim Polri," papar Rizka.

Legislator Dapil Sumsel I itu menyatakan kerja nyata dari Bareskrim tersebut memiliki dampak yang luar biasa untuk masyarakat di Indonesia. Terkhusus hal tersebut juga berhasil menyelamatkan generasi penerus bangsa. "Saya selaku keterwakilan Perempuan dari Komisi III menyatakan apresiasi yang luar biasa dan memberikan semangat untuk terus dapat mengungkap sindikat narkoba lainnya," ungkapnya.

Rizka juga menyatakan bila Bareskrim harus terus melanjutkan kerja nyata dalam mengungkapkan kasus besar termasuk sindikat narkoba. Pahalanya, hal tersebut sangat penting untuk dapat mewujudkan Indonesia yang sehat tanpa narkoba dan juga dapat menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. "Hal ini telah menyelamatkan generasi penerus Bangsa, mari lanjutkan bersama untuk membasmi

habis gembong sindikat Narkoba mewujudkan Indonesia Sehat tanpa Narkoba," Jelas Rizka.

Sebelumnya, Bareskrim Polri berhasil menangkap total 39 anak buah bandar besar narkotika jaringan internasional Fredy Pratama alias Miming alias Cassanova. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut sosok Fredy Pratama merupakan salah satu sindikat penyalur narkotika terbesar di Indonesia. Fredy sendiri telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014. — **ssb/aha**

Anggota Komisi III DPR RI Siti Nurizka Puteri Jaya.



FOTO: EOT/PDT



El Nino Sudah Dapat Diprediksi Tahun Lalu, Harusnya Mitigasi Kekeringan Teratasi

Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam melihat kejadian El Nino sebagai hal yang seharusnya telah dapat diantisipasi oleh Pemerintah. Lantaran El Nino sudah dapat diprediksi kejadiannya, bahkan satu tahun sebelum kejadian. Sehingga, antisipasi untuk mengatasi kekeringan air seperti saat ini, dapat ditangani dengan cara mitigasi irigasi perairan bagi pertanian. Sehingga, upaya tersebut dapat dilakukan agar air hujan dapat tertampung dalam tanah dan penyimpanan air di embung-embung.

”
MITIGASI EL NINO ITU HARUS SUDAH (DIANTISIPASI). NAH SEKARANG INI KAN KALAU KITA MENYIMAK PENJELASAN PEMERINTAH KHUSUSNYA DI BIDANG PERTANIAN, MITIGASI DENGAN ADANYA EL NINO INI KAN BELUM KELIHATAN.

"Mitigasi El Nino itu harus sudah (diantisipasi). Nah sekarang ini kan kalau kita menyimak penjelasan pemerintah khususnya di bidang pertanian, mitigasi dengan adanya El Nino ini kan belum kelihatan. sehingga setiap kebijakan kalau ada dampak misalnya El Nino, kebakaran hutan, kekeringan itu penyelesaiannya itu hanya penyelesaian ya sporadis, sehingga tidak sustainable karena tidak dipersiapkan secara seksama," ujarnya pada **Parlementaria** di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).

Mitigasi irigasi tersebut, tegasnya, seharusnya telah dilakukan dari tahun lalu terutama pada saat masih musim hujan. Sehingga sumber air ketika hujan dapat tertampung dalam tanah dan nantinya dapat dinaikan kembali dengan sarana pompa air sumur dalam. Kemudian juga melakukan pengeboran sumur dan pengerukan embung-embung untuk mempertahankan produktivitas pangan di tengah kekeringan akibat dampak adanya El Nino yang diperkirakan akan terjadi hingga akhir tahun ini.

"Sehingga yang penting, ada air, kalau menanam itu yang penting kan ada air di sawah sehingga mereka bisa mengolah. Petani-petani bisa mengolah lahan secara seksama. Sehingga mitigasi El Nino itu harus dipersiapkan satu tahun sebelumnya, ya tadi misalnya untuk pengeboran sumber-sumber air, penyimpanan air lewat embung-embung begitu," jelas Politisi Fraksi PKB ini. gal/rdn



FOTO: DOK/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam.

Komisi V Minta Jembatan Cikareteg Bogor Segera Rampung



FOTO: GEP/PDI

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan

guna mendorong percepatan proyek perbaikan Jembatan Cikereteg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dapat dirampungkan Oktober 2023. Sebab, jembatan yang runtuh karena longsor itu, perlu segera diperbaiki. Karena itu, Komisi V ingin menginventarisasi segala kebutuhan dan permasalahannya, sehingga bisa dilintasi semua jenis kendaraan secara normal.

"Dari hasil kunjungan ini, kami mengapresiasi kerja teman-teman PUPR yang begitu tanggap dan respons dalam memberikan pelayanan penanganan kerusakan jembatan ini dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Kami lihat progresnya sangat cepat, hanya delapan bulan. Kami yakin Oktober 2023 bisa selesai," kata Roberth dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ke Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/9).

Roberth mengemukakan bahwa selesainya Jembatan Cikereteg berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat, pemerataan dan

peningkatan ekonomi masyarakat. "Sejak terjadi longsor yang mengakibatkan terputusnya akses jalan Bocimi, ini langsung menjadi perhatian kami (Komisi V). Maka Komisi V sebagai mitra pemerintah di bidang infrastruktur memberikan dukungan penuh agar segera menangani masalah ini," ujar Politisi Fraksi NasDem ini.

Roberth mengatakan akses Jembatan Cikereteg sangat dibutuhkan masyarakat, sebab menjadi penghubung dua daerah. Ia juga memberikan apresiasi pada Kementerian PUPR yang memberikan respon cepat. "Kami apresiasi karena responnya cepat dan bulan Oktober sudah bisa digunakan seutuhnya," kata Roberth.

Lebih lanjut, Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengatakan kedatangan Komisi V ke lokasi pembangunan Jembatan Cikereteg untuk memastikan bahwa proyek pembangunan yang bersumber dari APBN sesuai dengan rencana, secara waktu *on time*, tepat anggaran, dan terpenting fungsinya bisa maksimal agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Komisi V optimis pembangunan Jembatan Cikereteg akan rampung Oktober 2023 dan sudah bisa dilalui normal," katanya. Lebih lanjut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, K.M. Arsyad, mengatakan, dengan adanya kunjungan Komisi V DPR RI diharapkan secara bersama dapat melakukan pengawalan dan percepatan pekerjaan. "Kami *schedul-*kan Jembatan Cikereteg selesai Oktober," katanya. [go/rdn](https://www.go.rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Media Sosial Jadi *Marketplace*, Komisi VI: Perlu Regulasi yang Jelas

Wakil Ketua
Komisi VI DPR
RI Mohamad
Hekal menilai
adanya

fenomena sosial media yang berubah menjadi *e-commerce* perlu dibuat regulasi. Sebab, adanya *social-commerce* saat ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada UMKM yang ada, jika tidak segera diatur.

"Nah apakah ini secara perizinannya udah ada? Makanya saya bilang tadi dari segi peraturan yang begini kita harus regulasi cepat dan inovasi ataupun perubahan dari pada regulasinya enggak boleh lambat," ujarnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).

Untuk itu, Politisi Fraksi Gerindra ini mendukung langkah pemerintah yang akan membuat regulasi terkait perdagangan digital dalam

media sosial. Ia menekankan pemerintah harus cepat merespon segala perkembangan teknologi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Sementara kalau tiap-tiap ada kegiatan baru ya memang harus kitanya yang cepat bekerja. Supaya bisa menyiasati-lah perkembangan developer. Kita ini kan juga enggak mau membatasi inovasi dan seterusnya, tapi kalau inovasi yang disruptif dan memang kan harus disetel alurnya lah atau di setel temponya. Supaya enggak banyak makan korban. Tugas kita kan mengawasi itu bahwa perubahan teknologi akan terus terjadi kita enggak bisa hadang dan itu akan terus membuka peluang buat generasi muda kita berinovasi," jelasnya.

Diketahui, saat ini pemerintah berencana melakukan revisi

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Hal tersebut sebagai respon dari keluhan pelaku usaha yang tidak mampu bersaing dengan serbuan barang murah dari luar negeri melalui platform *social-commerce*. **— bia/aha**

”

NAH APAKAH INI SECARA PERIZINANNYA UDAH ADA? MAKANYA SAYA BILANG TADI DARI SEGI PERATURAN YANG BEGINI KITA HARUS REGULASI CEPAT DAN INOVASI ATAUPUN PERUBAHAN DARI PADA REGULASINYA ENGGAK BOLEH LAMBAT.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Mohamad Hekal.



FOTO: OLI/PTD

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Industri Kesehatan dan Pangan Masih Perlu Perhatian Lebih

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengatakan kluster BUMN Kesehatan dan kluster BUMN Pangan saat ini masih memiliki pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian lebih. Ia menyebut, saat ini peran kedua BUMN tersebut masih jauh dibanding kehadiran swasta di masing-masing bidang.

Misalnya, pada BUMN Kesehatan yang masih berkontribusi kurang dari 10 persen dalam *market share* di Indonesia. Industri kesehatan memiliki neraca impor yang

”

SEHINGGA KITA MEMPUNYAI TARGET YANG BAGAIMANA NEGARA BISA HADIR. SELAIN KONTEKS KETIKA TERJADI KRISIS PANGAN SEPERTI KEJADIAN-KEJADIAN YANG PERNAH TERJADI 2 TAHUN YANG LALU SEPERTI KASUS MINYAK GORENG KALAU PENGUSAANNYA HANYA DI BAWAH 10 PERSEN.

sangat tinggi. Hal tersebut berarti industri kesehatan tanah air masih bergantung pada impor.

”Peranan BUMN di dalam industri kesehatan itu kontribusi kurang dari 10 persen dari market share maupun market kapitalisasi yang ada di dalam pasar obat maupun pasar alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia. Lebih-lebih untuk pasar alat kesehatan, obat mungkin agak lebih mending tapi yang alat kesehatan sama sekali,” jelasnya dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Selain industri kesehatan, industri pangan juga disebut merupakan sektor strategis yang masih perlu perhatian khusus. Nusron mengatakan, untuk minyak goreng, BUMN menguasai kurang dari 10 persen pasar, sedangkan beras, Bulog hanya menguasai 8 persen pasar dan gula menguasai 38 persen dari total produksi nasional.

”Sehingga kita mempunyai target yang bagaimana negara bisa hadir. Selain konteks ketika terjadi krisis pangan seperti kejadian-kejadian yang pernah terjadi 2 tahun yang lalu seperti kasus minyak goreng kalau penguasaannya hanya di bawah 10 persen. Sehingga kami usul ini fokusnya adalah minyak goreng sama beras karena ini adalah komoditas yang sangat strategis termasuk juga daging. Ini juga perlu ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang,” jelasnya. **bia/rdn**



FOTO: OJI/PRDT

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023).



Dorong Terobosan Pengawasan Distribusi BBM & LPG Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon melakukan

Kunjungan Kerja Spesifik ke DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) Ngurah Rai dan TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Manggis di Denpasar, Bali. Dalam pertemuan, terdapat beberapa pembahasan, salah satunya terkait mendorong berbagai terobosan agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi, LPG 3Kg dan penerapan BBM 1 harga di Seluruh Wilayah Indonesia dapat ditingkatkan sehingga sesuai dan semakin tepat sasaran.

Menurut Dony, pengaturan distribusi BBM bersubsidi termasuk LPG 3 Kg sangat penting. Supaya tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan Pemerintah bersama DPR RI harus tepat sasaran guna menjamin masyarakat golongan tertentu mendapatkan haknya menikmati subsidi.

"Saya pikir untuk menunjang kegiatan ekonomi dan industri yang berpusat pada sektor pariwisata, harus terjamin dan terjaga karena sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian tersebut dan juga untuk kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran TBBM

dan DPPU Pertamina dan jaminan pasokannya di Provinsi Bali menjadi sangat penting," tegasnya di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Denpasar, Bali, pada Kamis (21/9).

Demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah kita menerapkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.

"Kami mendorong peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan semua pihak termasuk Polda agar tidak terjadi penyelewengan yang tidak kita harapkan agar subsidi dan dampaknya harga dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dalam menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi BBM untuk berbagai industri di Provinsi Bali. "Mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan," tandasnya. **upi/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Denpasar, Bali, pada Kamis (21/9/2023).

FOTO:ULE/PDT

Tifatul Sembiring: Indonesia Harus Siap Songsong Era Energi Hijau

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang siap menghadapi dan menyongsong era transisi energi, yaitu dari energi fosil ke sumber energi hijau dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian

”

SIAP ENGGAK SIAP YA HARUS SIAP (TRANSISI ENERGI). INI KAN SUATU KEPASTIAN YANG PASTI AKAN TERJADI. INI KAN SEHARUSNYA SUDAH BISA DIHITUNG. SEPERTI MENTRANSFORMASIKAN PLTU KE PLTG.

serius Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait mengingat saat ini perkembangan teknologi di sektor energi sangat pesat dan tak terelakkan.

”Siap enggak siap ya harus siap (transisi energi). Ini kan suatu kepastian yang pasti akan terjadi. Ini kan seharusnya

sudah bisa dihitung. Seperti mentransformasikan PLTU ke PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas),” tegasnya di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Denpasar, Bali, pada Kamis (21/9).

Legislator yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral tersebut menjelaskan, tantangan global terkait ketersediaan energi akan menjadi sangat dinamis. ”Kalau mau bertahan ya harus bisa menjaga pasok, yang mana di sini yang sering direbutkan yaitu *food* dan energi,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta Pemerintah untuk bisa memberi jaminan akan empat aspek yaitu Ketersediaan (*availability*), Keberlanjutan (*sustainability*), Keandalan (*reliability*), dan Keteramanan (*security*) dimana ada suatu garansi yang menjamin bahwa pasokan energi akan aman dan kontinu. Ia pun lantas mencontohkan kesulitan yang dihadapi negara-negara Eropa yang mengalami krisis energi imbas dari konflik Rusia-Ukraina.

Karenanya, ia mengajak agar semua pihak dapat saling bersinergi satu sama lain, mengesampingkan ego sektoral agar nawacita Indonesia yang terkait dengan *zero emission* dapat benar-benar terwujud. ”Jadi kita harus duduk sama-sama, berdiskusi, ini kan harus dihitung betul. Jangan lagi ada bancakan-bancakan, enggak maju-maju kita nanti kalau terus begini,” tandasnya. [srw/rdn](https://www.srw.rdn)



FOTO:SRW/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Denpasar, Bali, pada Kamis (21/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi VIII Setujui Kenaikan Anggaran Kemenag Jadi 74 Triliun

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memimpin rapat kerja bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Dalam rapat ini, Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Agama Tahun 2024 Kementerian Agama berjumlah Rp74.068.406.173.000,00. Anggaran ini meningkat sebesar Rp1.902.149.755.000,00 atau 2,64 persen dari pagu anggaran Tahun Anggaran 2024.

”
PADA RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI AGAMA RI MEMBAHAS PENYESUAIAN RKA-K/L TAHUN 2024 KEMENTERIAN AGAMA SESUAI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DISIMPULKAN BEBERAPA HAL.

Hal itu didasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 31 Juli 2023, yaitu sebesar Rp 72.166.256.418.000,00. "Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan

Menteri Agama RI membahas penyesuaian RKA-K/L tahun 2024 Kementerian Agama sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran disimpulkan beberapa hal," ujar Ace di ruang rapat Komisi VIII, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp201.784.622.000,00 atau 1,75 persen yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan kenaikan anggaran belanja pegawai operasional yang berada pada layanan fungsi agama. Adapun anggaran fungsi pendidikan tahun anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Banggar tahun 2024, sebesar Rp 62.305.595.383.000,00 atau 84,12% dari total alokasi anggaran tahun anggaran 2024 Kementerian Agama berdasarkan hasil pembahasan Banggar tahun 2024.

Anggaran yang disetujui tersebut akan difungsikan untuk pencapaian visi dan misi Kementerian Agama, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Dalam rapat ini disinggung pula soal sebaran anggaran berdasarkan fungsi yang memang masih belum sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, Kementerian Agama dapat meningkatkan anggaran fungsi agama.

Di kesempatan yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memperinci, pada peningkatan anggaran tersebut juga diperuntukkan pada gaji ASN di lingkungan Kementerian Agama sebesar 8 persen. Hal tersebut sesuai dengan Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, pada tanggal 16 Agustus Tahun 2023.

ssb/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin rapat kerja bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) di ruang rapat Komisi VIII, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

FOTO: JKA/PDI

Tim Kunspek Komisi VIII Tinjau Kesiapan Penanggulangan Kebencanaan di Yogyakarta

Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta terkait Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial PKH, Program Sembako, dan Bantuan Penanggulangan Bencana. Daerah tersebut merupakan salah satu wilayah Indonesia yang rawan bencana karena dekat dengan gunung merapi yang masih aktif.

"Untuk itu kami ingin mengetahui penanggulangan bencananya. Hal tersebut akan dijadikan bahan Komisi VIII DPR RI dalam merumuskan kebijakan terkait bidang sosial dan penanggulangan bencana," ujar Anggota VIII DPR RI My Esti Wijayati saat memimpin kunjungan kerja spesifik di kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) D.I. Yogyakarta, Senin (11/9).

Pada kesempatan ini juga pihaknya ingin melihat kesiapan di bidang kebencanaan yang dilakukan oleh BNPB terkait mencabut status siaga tiga gunung merapi. Supaya masyarakat bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan perekonomian di sekitar merapi, juga mengatasi bencana kekeringan dan bencana yang sering terjadi di Yogyakarta.

My Esti bersama rombongan tim secara simbolis menyerahkan bantuan paket bansos, senilai Rp548.142.729.842. dengan rincian; Program keluarga harapan senilai

Rp413.229.228.242, Program atensi Rp294.687.600, Program sembako Rp130.858.600.000, Penanggulangan bencana alam Rp1.354.914.000, dan Keserasian sosial sebanyak 2 paket Rp2.335.300.000.

Anggota Komisi VIII DPR RI juga meninjau proses penyaluran bantuan mobil dapur umum dan peralatan penanggulangan bencana dari BPNB kepada pemerintah daerah Sleman. "Dalam acara ini kita bisa melihat masyarakat di pemudah dalam pencairan bantuan sosial, bisa melalui ATM dan Kantor pos namun Esti mengingatkan jangan sampai bantuan tersebut di gunakan untuk hal yang tidak berguna juga kalo

jumlahnya lumayan besar harus ada pendampingan kepada masyarakat untuk dijadikan modal usaha," harap My Esti.

Dalam acara tersebut Esti berdialog dengan salah satu penerima bantuan menuturkan keseharian sebagai ibu rumah tangga menjadi tercukupi dengan adanya bantuan sembako ini. "Suami saya bekerja sebagai kuli bangunan. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat untuk keseharian dan tambahan. *Seneng banget*. Saya belanja kebutuhan pokok seperti beras, telur dan sayur," ucap ibu penerima bantuan.

— man/aha



Anggota VIII DPR RI My Esti Wijayati saat memimpin kunjungan kerja spesifik di kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) D.I. Yogyakarta, Senin (11/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi IX Ingatkan Pemerintah Tak Sporadis Atasi Polusi Udara

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan Pemerintah agar tidak fokus pada penanganan polusi udara untuk jangka pendek saja, namun perlu membuat rencana jangka panjang guna melindungi masyarakat dari tercemarnya udara. Khususnya untuk wilayah DKI Jakarta mengingat ibu kota masih menjadi salah satu kota besar dengan polusi udara terburuk di Indonesia.

Situs pemantauan kualitas udara, IQAir menempatkan Jakarta sebagai kota besar paling berpolusi di dunia pagi ini. Udara di Jakarta disebut tidak sehat. Dilihat dari situs IQAir, Selasa (19/9/2023) pukul 09.30 WIB, indeks kualitas udara Jakarta berada pada angka 165. Polutan utamanya ialah PM 2,5.

"Penempatan Jakarta sebagai kota besar paling berpolusi di dunia pada Selasa pagi, berdasarkan data IQAir, telah membunyikan lonceng 'tanda bahaya' bagi kesehatan warga ibukota dan sekitarnya," ujar Charles dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/9). DKI Jakarta diketahui menjadi kota terpolusi pertama di dunia di atas Dubai, Kuching, Riyadh dan Ho Chi Minh. Bahkan IQAir menyarankan warga Jakarta untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan karena kandungan polusi ibu kota sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan hal tersebut, Charles menilai peraturan yang diberlakukan saat ini guna mengatasi polusi udara di DKI Jakarta belum maksimal. Salah satunya kebijakan *work from home*

(WFH) yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu belakangan di lingkungan Pemprov DKI.

"Tanda bahaya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara sporadis seperti aturan WFH dan imbauan penanaman pohon saja. Namun harus dengan cara komprehensif dan berkelanjutan, yakni lewat sebuah *roadmap* yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan untuk turut bersama-sama secara masif menurunkan polutan," papar Charles.

Baru-baru ini, Pemprov DKI juga melakukan siasat untuk menekan polusi udara dengan melakukan penyemprotan air di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Namun begitu, Charles menilai seharusnya Pemerintah pusat ikut memantau perkembangan kebijakan Pemprov DKI dalam menekan polusi udara.

Charles menekankan, kesuksesan Pemerintah dalam mengurangi polusi udara

seharusnya bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Charles pun menyayangkan meski sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk DKI, tapi kualitas udara di ibu kota masih menjadi yang paling berpolusi di dunia.

"Sukses tidaknya penanganan polusi udara adalah hal yang sangat bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Seperti kata Presiden, banyak orang Jakarta batuk-batuk akibat polusi udara," ungkapnya.

— ann/aha



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

FOTO: FHN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Hadapi Era Disrupsi, Komisi X Terima Audiensi Bersama Mahasiswa Kampus Merdeka

Komisi X DPR RI menerima audiensi dari mahasiswa magang yang termasuk dalam Program 'Kampus Merdeka' di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Melalui audiensi ini diharapkan dapat membuka wawasan para mahasiswa magang mengenai sektor pendidikan di Indonesia melalui kacamata Komisi X DPR.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat membuka agenda tersebut di depan 83 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Ia mengingatkan era disrupsi perlu dihadapi dengan bijaksana.

"Kita saat ini telah memasuki era disrupsi termasuk di sektor pendidikan. Apakah kita siap menghadapinya? Maka, perlu untuk mengasah *hardskill* dan *softskill* karena kini satu problematika yang kompleks harus diselesaikan dengan berbagai jenis pengetahuan," ucap Fikri.

Sebab itu, Politisi Fraksi PKS itu sepakat jika sektor pendidikan ini perlu menerapkan nilai VUCA (*Vision, Understanding, Clarity, dan Agility*). Nilai ini, menurutnya, akan membantu menciptakan generasi bangsa yang tangguh dan sanggup beradaptasi menghadapi lingkungan yang fluktuatif, kompleks, dan penuh ketidakpastian.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 190,98 juta jiwa (69,25 persen) yang masuk dalam kategori usia produktif.

Mengetahui hal tersebut, Fikri berharap program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bisa menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk mengkoneksikan pengetahuan yang diperoleh di kelas dengan realita industri dan masyarakat terkini. Baginya, kesempatan ini harus dimanfaatkan penuh oleh mahasiswa.

"Sekarang generasi muda tidak boleh gaptek (gagap teknologi) dan perlu cepat beradaptasi. Semua

pengalaman dan pengetahuan dari berbagai bidang sekarang saling terkoneksi menghasilkan solusi yang komprehensif. Mahasiswa harus menunjukkan dan mengasah diri tanpa henti," tandasnya. ➡ ts/rdn



FOTO: DEP/PTD

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat menerima audiensi dari mahasiswa magang 'Kampus Merdeka' di Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).



Komisi XI Setujui Pagu Anggaran 2024 Kementerian PPN/ Bappenas Sebesar 2,1 Triliun

Komisi XI DPR RI bersepakat untuk menyetujui Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.102.741.189.000. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

"Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.102.741.189.000 dengan rincian per program yakni untuk Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp1.487.904.699.000 dan Dukungan Manajemen sebesar Rp614.836.490.000," ujar Dolfie saat membacakan kesimpulan rapat.

Pagu anggaran tersebut terbagi ke dalam masing-masing Eselon I Kementerian PPN/Bappenas dengan rincian yakni, Deputi bidang Ekonomi sebesar Rp214.454.442.130, Deputi bidang Regional sebesar Rp70.032.991.000, Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam sebesar Rp488.120.799.000, Deputi bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp25.590.146.000, Deputi bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan sebesar Rp20.450.000.000.

Kemudian untuk Deputi bidang Sarana Prasarana sebesar Rp68.355.034.000,

Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan sebesar Rp36.432.134.000, Deputi bidang Pendanaan Pembangunan sebesar Rp50.803.808.870, Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan sebesar Rp66.721.440.000, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas-Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp449.943.904.000, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas- Dukungan Manajemen Rp601.836.490.000 dan Inspektorat Utama Rp10.000.000.000.

Dalam rapat tersebut, Komisi XI DPR RI juga memperoleh penjelasan mengenai usulan tambahan Pagu Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN TA 2024 sebesar Rp206,15 Miliar dengan

rincian untuk Kebutuhan Belanja Pegawai sebesar Rp155,7 miliar meliputi penyesuaian besaran tunjangan kinerja dan tambahan formasi PPPK sebanyak 533 orang. Serta penyesuaian anggaran Kegiatan Hibah Luar Negeri sebesar Rp50,45 miliar meliputi Hibah *Compact II Millenium Challenge Corporation* dan *Pro Blue Grant and OMC Grant for Oceans for Prosperity Project* (LAUTRA). ➡ gal/rdn



FOTO: DEP/PTD

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi XI Tolak Usulan Pencairan PMN ke PT Bina Karya

Komisi XI DPR RI menolak usulan penambahan Penyertaan Modal negara (PMN) kepada PT Bina Karya (Persero) sebesar Rp500 miliar. Keputusan ini diambil dalam Rapat dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara beserta PT Bina Karya (Persero) dalam agenda pembahasan PMN tunai tahun 2023.

"Kementerian Keuangan tidak melaksanakan PMN tunai sebesar Rp 500 miliar yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2023 kepada PT Bina Karya (Persero)," ujar Wakil Ketua Komisi XI, Amir Uskara membacakan kesimpulan rapat yang diselenggarakan di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Kamis (14/9).

Dalam ringkasan eksekutif yang disampaikan oleh Boyke P. Soebroto selaku Direktur Utama PT Bina Karya persero disampaikan bahwa PMN diusulkan untuk perbaikan permodalan perusahaan guna meningkatkan kapasitas usaha untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara khususnya pada sektor telekomunikasi dan infrastruktur Dasar. PMN Rp 500 miliar tersebut akan digunakan untuk membiayai porsi ekuitas pembangunan fiber optik untuk *backbone* dan fiber optik bagi *lastmile* dan *Multi Utility Tunnel* (MUT) dengan total capex sebesar Rp2,8 triliun.

Dijelaskan pula bahwa dalam pelaksanaannya nanti PT Bina Karya akan bekerja sama

dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan pihak lainnya untuk membentuk perusahaan patungan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Penjelasan mengenai proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan yang sebelumnya dikenal bergerak di bidang konsultasi tersebut lantas mendapatkan bermacam tanggapan dari anggota dewan yang menghadiri rapat. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati ikut angkat bicara mengenai hal tersebut.

"Bina Karya dikasih PMN, dalam pelaksanaannya akan kerjasama dengan PT Telkom Indonesia. Lha kenapa nggak ke PT Telkom saja kalau memang memerlukan pekerjaan yang buat PT Telkom tentu nggak seberapa kalau pegang fiber optik," ujar Politisi Fraksi PKS itu dalam rapat.

Menurutnya, Pemerintah dan BUMN harus lebih bijak dalam mengelola anggaran negara

yang bersumber dari APBN. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu juga menyampaikan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak harus berasal dari dana pemerintah lantaran sudah ada skema lain yang dibuka. **uc/aha**



FOTO: ENO/PDT

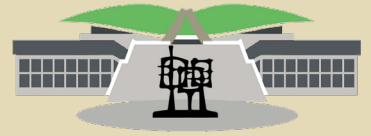
Wakil Ketua Komisi XI, Amir Uskara saat memimpin rapat Komisi XI DPR RI di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Kamis (14/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya





LENSA PARLEMEN



ANGGOTA KOMISI III DPR RI ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH SAAT MENJADI KEYNOTE SPEAKER DALAM ACARA FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) DI PENDOPLO KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN, JUMAT (16/9/2023). FOTO: QQ/PDT



WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI BUDHY SETIAWAN FOTO BERSAMA USAI MENERIMA AUDIENSI YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT DI GEDUNG NUSANTARA DPR RI, SENAYAN, JAKARTA, SENIN (18/9/2023). FOTO: AFR/PDT



SEKRETARIS JENDERAL DPR RI INDRA ISKANDAR FOTO BERSAMA USAI MEMBERIKAN KULIAH UMUM "MAGANG DI RUMAH RAKYAT" KAMPUS MERDEKA, DI SENAYAN, JAKARTA, SELASA (19/9/2023). FOTO: RSB/PDT